

Pemerintah
Kabupaten pamekasan



Renja

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PAMEKASAN

2025



**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama



peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut. Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Mei 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710707 199101 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 12	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	38
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	39
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023	41
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	68
3.3 Program dan Kegiatan.....	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	85
BAB V PENUTUP.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melibih Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	15
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan	17
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan	31
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan	43
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.....	58
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.....	69
Tabel 3. 2 Linearitas tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	71
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan	73
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	3
-----------------------	----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam



Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika; pembahasan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun Ke dua periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran



- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 18);
 35. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
 36. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 57);
 37. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 63);



38. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
39. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
40. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 94 Tahun 2023 Tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan periode 3 (tiga) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.



- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Pamekasan Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pada Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring opini dan aspirasi publik
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
		Penetapan kebijakan tata kelola informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Pelayanan Informasi Publik
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
		Membangun metadata statistik sektoral
		Pengembangan Infrastruktur
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Beberapa sub kegiatan yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
		Pengelolaan government chief information officer (GCIO)



Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor capaian program/kegiatan tidak sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan melebihi target	Solusi yang dilakukan
Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Aktifnya pemberitaan kegiatan pemkab diberbagai media yang telah bermitra dengan diskominfo	-	Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam kelangsungan pelaksanaan kegiatan
kecepatan kelengkapan adminstrasi oleh mitra kerja	Menggandeng Pihak ketiga sebagai penyedia database nasional berbagai media	-	memberikan tenggat waktu untuk terlaksananya proses administrasi secara tepat waktu
Ada beberapa item pekerjaan yang tidak terlaksana dikarenakan Timeline yang tidak cukup	Mapping pekerjaan yang terencana dengan jelas	-	Memperbaiki timeline pekerjaan
Feedback yang lemah dari OPD saat dilakukan koordinasi	Pembagian kerja yang merata dan kerjasama Tim yang baik	-	Peningkatan koordinasi antar Pimpinan Perangkat Daerah
Standar harga banyak tidak dapat tersedia dalam waktu cepat pada saat akan melakukan perubahan	Pelaksanaan Subkegiatan yang sesuai dengan target	-	memperbaiki mekanisme pengajuan standar harga yang dibutuhkan
Belum memadainya infrastruktur TIK	Tersedianya Forum Satu Data Kabupaten Pamekasan	-	menyediakan infrastruktur TIK yang memadai
Minimnya tenaga IT dan Statistisi	Terbentuknya Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pamekasan	-	mengikuti pelatihan IT serta penyediaan kebutuhan tenaga IT maupun di bidang terkait lainnya
Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang keamanan informasi menjadi kendala signifikan dalam penerapan kebijakan.	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan regulasi seperti Perpres, Peraturan BSSN dan lainnya.	-	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:



1. Perubahan indikator kinerja dan target capaian program renstra yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada
2. Pekerjaan akan terlaksana sesuai timeline
3. OPD memberikan feedback sesuai yang diminta

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut sebagai berikut:

1. Memperbaiki timeline pekerjaan serta mempersiapkan kebutuhan administrasi mulai dari mempersiapkan dokumen anggaran sampai pada proses pencairan
2. Peningkatan koordinasi antar Pimpinan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi		100%	100%	100%	100%	200%			
						Nilai SAKIP OPD	82				82	82	1		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6	6	6	6	100%	6	18	3	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun		3					3		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilakukan		12						12	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		3	3	100%	3	6	200%	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	1	6	1	1	100%	1	8	800%	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1	6	1	1	100%	1	8	800%	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	1	6	1	1	100%	1	8	800%	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	1	6	1	1	100%	1	8	800%	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		2	2	2	100%		4		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2					2	2	100%			
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	4	4	4	100%	8		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4				4	100%	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1	1	1	100%	1	3	300%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	14	22	21	95%		35	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22				22	22	100%
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi yang dilakukan		41				41	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10	10	10	100%	10	30	300%
2	16	01	2.05	02	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27						
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10				10	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10				10	10	100%



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Perundangan undangan yang disosialisasikan					0			
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1	1	100%	1	3	300%		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			3	3	100%		3	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3					3	3	100%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis perkantoran yang tersedia		21	25	23	92%		44	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25					25	25	100%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		150	3	2	67%		152	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3					3	3	100%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		16000	4	4	100%		16004	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4					4	4	100%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan		48	48	12	25%		60	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48					48	48	100%
2	16	01	2.06	10		Jumlah surat menyurat yang terlayani		2000	4	2	50%		2002	



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4					4	4	100%
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	2	5	7	4	57%	2	11	550%
2 16 01 2.07 01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5							
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2							
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		12	2	2	100%		14	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2					4	4	200%
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	5	10	10	10	100%	5	25	500%
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar		5	12	12	100%		17	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12					12	12	100%
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12	100%	12	24	200%
		Jumlah jasa administrasi pelayanan yang tersedia		51					51	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	11	1	1	1	100%	11	13	118%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara		36	2	2	100%		38	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3					3	3	100%	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beroperasi		30	3	3	100%		33	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3					3	3	100%	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		5	4	3	75%		8	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4					4	4	100%	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat			2	1	50%		1	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara		1					1	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2					2	2	100%	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi		1,89	3	1,89	63%		3,78	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik		3	3	3	100%		6					
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		2,67	3	2,67	89%		5,34					
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%						100%	1	100%			
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		100%	100%	97,8%	98%		197,80%		
					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	75%						70%	70%	93%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah survey kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah			6	1	17%		1	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1						1	1
2	16	02	2.01	4		Jumlah konten yang dikelola			6	1	17%		1	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2				2	2	100%				
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola		3	6	6	100%		9	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		3				3	3	100%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID OPD/Unit Kerja yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi		52	6	6	100%		58	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		1				1	1	100%
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasipnal dan prioritas daerah		176	6	6	100%		182	
					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		5				5	5	100%
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika		0,938	3	0,938	31%		1,876	
						Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi		1,75	3	1,75	58%		3,5	
						Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK		1	3	1	33%		2	
						Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE		1	3	1	33%		2	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60					60	60	100%			
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3					3	3	100%			
		Domain Tata Kelola SPBE	3					3	3	100%			
		Domain Manajemen SPBE	3					3	3	100%			
		Domain Layanan SPBE	3					3	3	100%			
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	95%	95%	100%	105%	100%	295%	295%
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015		95%	100%	100%		1,95	
					Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1					1	1	100%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem jaringan intra pemerintah daerah		1	1	1	100%		2
					Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1					1	1	100%



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)		95%	95%	95%	100%		190%	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	42					42	42	100%
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Masterplan SPBE	1					1	
					Tersedianya Rencana Induk SPBE	1				1			
					Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	40				40			
					Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	3	1	33%	3	4	133%	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	12	12	6	50%		18	
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12				12	12	100%
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city					1	1	



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi			3	0	0%		0		
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3				3	3	100%		
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer yang dikelola			1	0	0%		0		
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1				1	1	100%		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			3	3	100%		6		
					Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik			1	3	1	33%		2	
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%					100%	1	100%	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%		200%		
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	40					20	20	50%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan		1	4	4	100%		5	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4					4	4	100%
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Pemda		42	42	42	100%		84	
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	42				42	42	100%	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral		1	1	1	100%		2	
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	40				20	20	50%	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur data yang dikembangkan		1	1	1	100%		2	
						Jumlah Infrastruktur Statistik	1				1	1	100%	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		4	2	2	100%		6	
						Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	850				850	850	100%	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian		1	3	1	33%		2	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK		1	3	1	33%		2					
		Indeks keamanan informasi	2					1	1	50%				
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah		0	0,1	0	0%		0		
					Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	6%					3%	3%	50%	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan		3	1	33%		1		
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3					3	3	100%	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1				1	1	100%	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah		1	42	30	71%		31	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42					42	42	100%
2	21	02	2.02							
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	15					10	10	67%
2	21	02	2.02	01						
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6					4	4	67%

Dari tabel diatas terdapat perubahan nomenklatur 1350 pada tahun 2025 yang menyebabkan ketidaksesuaian antara sub kegiatan pada tahun 2022 dengan tahun 2025. Diantara sub kegiatan yang mengalami perubahan target dan pagu anggaran terdapat pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Serta Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
IKU DISKOMINFO												
1	Indeks pelayanan publik (IPP)		v		4,00	4,50	4,85		0%	4,00	4,50	
a	Indeks SPBE		v		2,5	2,5	2,5	2,89	0%	2,5	2,5	
b	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral		v		2,0	2,0	2,1		0%	2,0	2,0	
IKK DISKOMINFO												
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Realisasi capaian Tahun 2024 belum terukur karena diukur pada akhir tahun 2024
2	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
4	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		v	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0%	Tidak ada	Tidak ada	
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
6	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
7	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		v	95%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
8	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
9	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		v	63,16%	25%	25%	25%	0%	0%	25%	25%	
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		v	63,16%	65%	65%	65%	63,63%	0%	65%	65%	
11	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
12	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		v	63,16%	33%	33%	33%	30,43%	0%	33%	33%	
13	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
14	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		v	35,71%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
15	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		v	35,71%	50%	75%	75%	100%	0%	75%	75%	
16	Persentase data yang dapat berbagi pakai		v	35,71%	2,3%	2,3%	2,3%	2,38%	0%	2%	2,3%	
17	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		v	35,71%	90%	90%	90%	90,47%	0%	90%	90%	
18	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		v	59,52%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
19	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		v	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0%	Ada	Ada	
20	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
21	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		v	0,55%	100%	100%	100%	94,44%	0%	100%	100%	
22	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		v	25,36%	100%	100%	100%	42,01%	0%	100%	100%	
23	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		v	0,90%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
24	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
25	Tersedianya buku profil daerah		v	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0%	Ada	Ada	
26	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		v	1	5 survey	5 survey	6 survey	41 Survey	0%	5 survey	6 survey	
27	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		v	Tidak Ada	7 Kompilasi	7 Kompilasi	8 Kompilasi	7 Kompilasi	0%	7 Kompilasi	8 Kompilasi	
28	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		v	1	5 Survey	5 Survey	6 Survey	5 Survey	0%	5 Survey	6 Survey	
29	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		v	Tidak Ada	7 Kompilasi	7 Kompilasi	8 Kompilasi	7 Kompilasi	0%	7 Kompilasi	8 Kompilasi	



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
30	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		v	100%	100%	100%	100%	86,66%	0%	100%	100%	
31	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral		v	100%	100%	100%	100%	86,66%	0%	100%	100%	
32	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		v	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
33	Tingkat keamanan informasi pemerintah		v	0,1	1	2	2	0%	0%	2	2	
34	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		v	30%	8%	8%	8%	0%	0%	8%	8%	
35	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		v	1 Aplikasi	15%	20%	20%	5,26%	0%	20%	20%	
36	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		v	30%	5%	10%	10%	0%	0%	10%	10%	
37	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		v	30%	5%	13%	13%	0%	0%	13%	13%	



Dari tabel diatas pada realisasi tahun 2024 belum dapat terukur dikarenakan penyelesaian dokumen dilakukan sebelum akhir tahun 2024. Maka dari itu, dari 37 indikator tersebut pada kolom realisasi tahun 2024 belum terdapat realisasi.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Pusat Data Nasional
2. Satu Data indonesia
3. Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi melalui proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien
- c. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan
- d. Belum Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data



2.3.2 Dampaknya terhadap Pencapaian pembangunan daerah terhadap Capaian Program Nasional dan SDGs

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu **“Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel”** dengan sasaran pembangunan **”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik”** yang didukung oleh program Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dalam mendukung SDGs dinas komunikasi dan informatika pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pamekasan dengan tujuan :

1. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, dengan indikator; Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, dengan indikator; Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, dengan indikator
 - a. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
 - b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
 - c. Proporsi individu yang menggunakan internet



4. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, dengan indikator Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan indikator
 - a. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
 - c. Proporsi individu yang menggunakan internet.
 - d. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Mengaktifkan Komunitas Informasi Masyarakat menjadi garda pertama edikasi digital dilingkup lokal kampung dan desa
- b. Menjembatani dan meningkatkan peran PPID Desa bagi keterbukaan informasi publik
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE yg terlalu singkat
- d. Kurangnya partisipasi OPD terkait indeks SPBE seta kurang konsisten dengan Program yg sdh dipilih sebagai Quickwin



- e. Ancaman siber yang terus berkembang, pelaku kejahatan siber mengembangkan teknik serangan yang lebih canggih dan terarah, seperti malware, ransomware
- f. Kurangnya kesadaran keamanan informasi yang rendah dan keahlian tenaga keamanan informasi yang terampil dan berpengalaman masih kurang
- g. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Data Yang belum memadai
- h. Minimnya Kualitas dan Kapabilitas Pengelola Data di setiap instansi Pemerintahan
- i. Ego sektoral di setiap instansi pemerintahan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- c. Meningkatnya indeks SPBE serta pelayanan e-government
- d. Pembangunan Smart City terstruktur dan terarah sesuai dgn Masterplan Smart City
- e. Meningkatkan teknologi keamanan informasi dengan teknologi baru seperti AI, machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan ancaman
- f. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi di kalangan pengguna dan tenaga ahli keamanan informasi melalui edukasi dan pelatihan keamanan informasi
- g. Tersedianya Platform Satu Data Indonesia
- h. Penyelenggaraan Statistik sektoral
- i. Peraturan Perundang -undangan yang mendasari pelaksanaan statistik sektoral



2.3.4 Rekomendasi dan Catatan yang Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengembangan Sistem Informasi berbasis IT dalam upaya Peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
- b. Melakukan pelatihan untuk meng-*upgrade skill* dan pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan *e-government*
- c. Memaksimalkan pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan serta asistensi pengelolaan informasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informatika
- d. Meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat serta mengelola persepsi publik dengan publikasi di berbagai media
- e. Terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur *E-government* guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- f. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dengan didukung oleh sandiman yang kompeten.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan, Urusan Pilihan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 program, 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Serta 1 program penunjang dan 22 sub kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Nilai SAKIP OPD	82	4.212.460.036	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Nilai SAKIP OPD	82	4.689.778.249	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 dokumen	96.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 dokumen	134.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	56.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	90.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	22.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD	2.460.901.955	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD	2.838.655.843	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.460.901.955	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.838.655.843	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 orang	46.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 orang	40.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	40.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	36.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 kantor	113.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 kantor	58.575.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	3.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	12.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 laporan	65.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	41.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	2.575.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah prasarana yang layak fungsi	2 unit	110.386.005	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah prasarana yang layak fungsi	2 unit	113.886.325	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	110.386.005	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 unit sepeda motor	100.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	5 jasa	1.319.936.401	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	151.636.401	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	8.886.325	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.168.300.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	5 jasa	1.356.106.756	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	11 unit	132.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	123.608.756	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	72.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.232.498.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	11 unit	80.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	41.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	5.150.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	1.797.614.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	3.090.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (2024)	75%	1.797.614.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	30.900.000	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	8 Komunitas	24.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2.023.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	56.114.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (2024)	70%	2.023.000.000	Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	5.000.000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	5.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	60 Media	1.707.500.000	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan konten	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	5.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 dokumen	100.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	3.450.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	63.000.000			Domaian Kebijakan Internal SPBE	3			
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 dokumen	1.850.000.000			Domain Tata Kelola SPBE	3			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	3.440.590.000			Domain Manajemen SPBE	3			
			Domaian Kebijakan Internal SPBE	3				Domain Layanan SPBE	3			
			Domain Tata Kelola SPBE	3			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	15.000.000	
			Domain Manajemen SPBE	3			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	15.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Domain Layanan SPBE	3		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase Layanan Publik yang dPersentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standariselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	100%	3.435.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.300.590.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	200.000.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.590.000	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	25.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	3.285.000.000	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	42 Unit	30.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	140.000.000	Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	3.180.000.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	260.000.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 aplikasi	15.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	40 Kompilasi Produk Administrasi	260.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 Orang	10.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	10.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	90.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	211.609.012	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	100.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	20 Kompilasi Produk Administrasi	211.609.012	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	20 Dokumen	10.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	42 orang	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Indeks keamanan informasi	II	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20 metadata	25.050.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	6%	110.000.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 infrastruktur	10.059.012	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	10.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	850 data	106.500.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Indeks keamanan informasi	II	80.250.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42 Perangkat Daerah	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pemangangan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	3%	69.950.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	15%	40.000.000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 dokumen	20.600.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	40.000.000	
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	13.300.000						
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42 perangkat daerah	36.050.000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	15%	10.300.000						
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 perangkat daerah	10.300.000						

Dari tabel diatas pada hasil analisis kebutuhan tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan awal RKPD dikarenakan adanya perubahan nomenklatur 1350 yang menyebabkan terjadinya perubahan sub kegiatan serta terdapat penyesuaian target dan pagu anggaran pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Perubahan sub kegiatan tersebut terdapat pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Serta Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:



**Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pamekasan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tematik dan arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan dalam RKP tahun 2025. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2025, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023-2024, evaluasi kebijakan tahun 2023-2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan antara lain:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Gambar 4. 1. Agenda Pembangunan Nasional pada RKP 2025

Dari lima agenda pembangunan tersebut, kemudian dijabarkan dalam penekanan tema pembangunan pembangunan yaitu:



A. SDM Berdaya Saing dan Produktif

1. Transformasi Sosial, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
- b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.
- c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
- d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
- e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
- f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

B. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas

1. Transformasi Ekonomi, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- b) Penguatan infrastruktur digital.
- c) Pengembangan infrastruktur transisi energi.
- d) Percepatan infrastruktur IKN.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.



C. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan

1. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- b) Pengembangan skema graduasi bansos.
- c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
- e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
- f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan.
- g) Peningkatan produksi industri pengolahan
- h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendukung pada agenda pembangunan transformasi ekonomi dengan fokus penguatan infrastruktur digital.

Adapun terdapat 8 Prioritas Nasional (PN) pada wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang masuk dalam RKP 2025 antara lain:



A. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

- 1) Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.
- 2) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
- 3) Pembangunan dan revitalisasi Museum PETA (Pembela Tanah Air).

B. Prioritas Nasional (PN) 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- 1) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Mojolagres (100 liter/detik).
- 2) Pembangunan Intake Sungai Rejoso (1.000 liter/detik) dan Jaringan Pipa
- 3) Transmisi Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
- 4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kali Rejoso (1.000 liter/detik).
- 5) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
- 6) Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten-Kota Probolinggo.
- 7) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Mojokerto.
- 8) Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan.
- 9) Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan – perkapalan dan garam.
- 10) Pengembangan industrialisasi perikanan yang modern terintegrasi, dan berkelanjutan.



- 11) Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Surabaya dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Surabaya dan garda maritim Indonesia bagian timur.
- 12) Fasilitasi business matchmaking startup digital.
- 13) Fasilitasi digital technopreneur.
- 14) Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
- 15) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi serta tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle*.

C. Prioritas Nasional (PN) 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- 1) Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi yang memiliki interlinkage and match yang kuat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- 2) Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Buntung (akses Bandara Juanda).
- 3) Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong.
- 4) Revitalisasi pelatihan vokasi di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya.
- 5) Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- 6) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Beran.
- 7) Pembangunan Jalan Pansela.
- 8) Preservasi Jalan mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik Ruas Sadang (Bts. Kabupaten Lamongan) - Bts. Kota Gresik.



- 9) Preservasi Jembatan Manyar mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik.
- 10) Penggantian dan Duplikasi Jembatan Modangan.
- 11) Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu - Bts. Kota Tuban.
- 12) Pelebaran Jalan Nasional Situbondo-Ketapang.
- 13) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional.
- 14) Sentra Pengolahan Perikanan Bengkorok (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terpadu).
- 15) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Abdurrachman Saleh.
- 16) Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman.
- 17) Penguatan produktivitas industri tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki.
- 18) Penguatan ekosistem kuliner.
- 19) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan
- 20) infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola
- 21) Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama KabupatenKota Probolinggo
- 22) Rehabilitasi Daerah Irigasi Pondok dan Pacal.
- 23) Pengendalian banjir Kali Jeroan, Ring Ngotok Kanal, dan Kali Konto Hilir
- 24) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi.
- 25) Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif.
- 26) Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim.



D. Prioritas Nasional (PN) 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- 1) Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang Pendidikan.
- 2) Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan.
- 3) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pemagangan dalam negeri.
- 4) Penurunan kematian ibu dan bayi.
- 5) Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).
- 6) Pembangunan kualitas keluarga.
- 7) Percepatan penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran.
- 8) Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 9) Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan IAIN Kediri.
- 10) Fasilitasi literasi digital.
- 11) Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan bertaraf internasional pada



Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Higher Education for Technology and Innovation Project” (HETI) dan Universitas Brawijaya melalui proyek Pinjaman Luar Negeri KfW “Quality Improvement of Academic Hospital of Brawijaya University”.

- 12) Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Madiun, dan Politeknik Negeri Malang.

E. Prioritas Nasional (PN) 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- 1) Hilirisasi industri tembaga dan bauksit.
- 2) Hilirisasi industri sawit, kelapa, dan karet.
- 3) Hilirisasi industri rumput laut.
- 4) Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi.
- 5) Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar.
- 6) Pengembangan industri elektronik dan digital.
- 7) Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan.
- 8) Pengadaan kapal perintis.
- 9) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistic.
- 10) Pengembangan Bandara Hub Juanda.

F. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

- 1) Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.



- 2) Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Wilayah Madura.
- 3) Surabaya Regional Railway Line.
- 4) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Metropolitan Surabaya.

G. Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

- 1) Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

H. Prioritas Nasional (PN) 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

- 1) Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.
- 2) Rehabilitasi kerusakan lahan.
- 3) Pengembangan perhutanan sosial melalui sarana ekonomi produktif, penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi penyusunan dan pengesahan rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial, dan fasilitasi peningkatan kelompok usaha perhutanan sosial ke kelas gold.
- 4) Pengendalian lahar Gunung Semeru.



Pada Prioritas Pembangunan nasional, adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan masuk pada prioritas nasional :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fokus Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan fokus Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba dengan fokus Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika masuk pada misi ke-3 yaitu, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berdasarkan Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2025
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks pelayanan publik (IPP)	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Adapun bobot dari masing-masing aspek sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Aspek Kebijakan pelayanan 30% Aspek Profesionalisme SDM 18% Aspek Sarana Prasarana 15% Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 15% Aspek Konsultasi dan Pengaduan 15% Aspek Inovasi 7% 	4,0
	Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hasil yang didapatkan dari penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah yang kemudian disebut sebagai indeks SPBE. Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai; aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai, dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator. $\text{Indeks SPBE} = \sum_{i=1}^n ND_i \times BD_i$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i; BDi adalah nilai bobot domain ke-i; NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i. 	2,5
	Meningkatnya integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. 	2,0



Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2025
			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistic dijabarkan sebagai berikut: 	
			$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$	
			dimana: <ul style="list-style-type: none"> • K adalah Banyaknya domain penilaian; • Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; • Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k. 	

Sumber: IKU Dinas Komunikasi dan Informatika 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 disusun sebanyak 5 program, 13 KEGIATAN, 41 SUB KEGIATAN yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, (3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, (5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 2 Linearitas tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Meningkatnya kematangan domain SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
PROGRAM PENGELOLAAN		Pengelolaan Informasi dan	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	



Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik		
				Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik		
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
				Penyusunan konten		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
					Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	
					Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya integrasi data statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia						
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pamekasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		Indeks pelayanan publik (IPP)	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	4,5	-	APBD		4,85	-				
	Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE		81	9.756.300.036,00	APBD		81	9.991.515.037,00				
	Meningkatnya integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral		2,5	211.609.012,00	APBD		2,5	275.431.282,00				
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	82,00	4.212.460.036	APBD		82,00	4.218.040.837	
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	6 Dokumen	96.650.000	APBD		6 Dokumen	99.349.500	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	3 Dokumen	56.650.000	APBD		3 Dokumen	58.349.500
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	20.000.000	APBD		2 Laporan	21.000.000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	10.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	1 OPD	2.460.901.955	APBD		1 OPD	2.534.729.013
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	22 Orang/Bulan	2.460.901.955	APBD		22 Orang/Bulan	2.534.729.013
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	10 Orang	46.000.000	APBD		10 Orang	37.131.500
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	27 Paket	10.000.000	APBD		0	-
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	36.000.000	APBD		10 Orang	37.131.500
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	1 Kantor	58.575.000	APBD		1 Kantor	60.350.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	3 Paket	2.000.000	APBD		3 Paket	2.100.000
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25 Paket	3.000.000	APBD		25 Paket	3.100.000
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	6.000.000	APBD		3 Paket	6.300.000
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	4.000.000	APBD		4 Paket	4.200.000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48 Laporan	41.000.000	APBD		48 Laporan	42.000.000
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4 Dokumen	2.575.000	APBD		4 Dokumen	2.650.000
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	2 Unit	113.886.325	APBD		2 Unit	9.152.665
2 16 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	5 unit sepeda motor	100.000.000	APBD		0	-



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	00	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		2 unit	5.000.000	APBD		0	-
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	8.886.325	APBD		2 Unit	9.152.665
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	5 Jasa	1.356.106.756	APBD		5 Jasa	1.394.577.959
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Laporan	123.608.756	APBD		12 Laporan	125.105.019
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	12 Laporan	1.232.498.000	APBD		12 Laporan	1.269.472.940
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	11 Unit	80.340.000	APBD		11 Unit	82.750.200
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	3 Unit	41.200.000	APBD		3 Unit	42.436.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	5.150.000	APBD		3 Unit	5.304.500
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	3.090.000	APBD		4 Unit	3.182.700
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	30.900.000	APBD		2 Unit	31.827.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	100%	2.023.000.000	APBD		100%	2.131.605.200



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	75%	2.023.000.000	APBD		80%	2.131.605.200
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.304.500
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		2 Dokumen	5.000.000	APBD		2 Dokumen	5.304.500
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		3 Dokumen	100.000.000	APBD		3 Dokumen	150.000.000
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		1 Dokumen	63.000.000	APBD		1 Dokumen	66.836.700
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		5 Dokumen	1.850.000.000	APBD		5 Dokumen	1.904.159.500



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	16	03	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	60%	3.440.590.000	APBD		60%	3.559.319.500				
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		3		APBD		3					
		Domain Kebijakan Internal SPBE		3		APBD		3					
		Domain Tata Kelola SPBE		3		APBD		3					
		Domain Manajemen SPBE		3		APBD		3					
		Domain Layanan SPBE	3	APBD		3							
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	100%	3.300.590.000	APBD		100%	3.410.793.500	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	1 dokumen	15.590.000	APBD		1 dokumen	15.913.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 Unit	3.285.000.000	APBD		1 Unit	3.394.880.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	42 OPD	140.000.000	APBD		42 OPD	148.526.000
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen	100.000.000	APBD		3 Dokumen	106.090.000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	12 Aplikasi	15.000.000	APBD		12 Aplikasi	15.913.500
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		3 Dokumen	15.000.000	APBD		3 Dokumen	15.913.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.609.000
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	100%	211.609.012	APBD		100%	275.431.282
2 20 02 2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	40 Kompilasi Produk Administrasi	211.609.012	APBD		60 Kompilasi Produk Administrasi	275.431.282
2 20 02 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	4 Dokumen	40.000.000	APBD		4 Dokumen	42.436.000
2 20 02 2,01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		42 Orang	30.000.000	APBD		42 Orang	31.827.000
2 20 02 2,01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		40 Metadata	25.050.000	APBD		60 Metadata	26.522.500



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		1 Infrastruktur	10.059.012	APBD		1 Infrastruktur	15.510.782
2	20	02	2,01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		850 Data	106.500.000	APBD		850 Data	159.135.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan informasi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	II indeks	80.250.000	APBD		III indeks	82.549.500
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	6%	69.950.000	APBD		10%	71.949.500
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	3 Dokumen	20.600.000	APBD		3 Dokumen	21.218.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik		1 Laporan	13.300.000	APBD		1 Laporan	13.600.000
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		42 Perangkat Daerah	36.050.000	APBD		42 Perangkat Daerah	37.131.500
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	15%	10.300.000	APBD		20%	10.600.000
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	6 Perangkat Daerah	10.300.000	APBD		8 Perangkat Daerah	10.600.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
2 1 6 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	0	1.200.175. 362	0	1.144.738. 961	0	1.147.738. 961	82, 00	1.139.7 38.960	82,00	4.632.392.24 4
2 1 6 0 1 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1	39.800.00 0	2	28.000.00 0	2	29.000.00 0	1	38.000. 000	6 Dokum en	134.800.000
2 1 6 0 1 2. 01 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	20.000.0 00	3 Dokum en	90.000.000
2 1 6 0 1 2. 01 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	-	0	-	1	3.000.00 0	1 Dokum en	3.000.000
2 1 6 0 1 2. 01 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	0	-	1	3.000.000	0	-	0	-	1 Dokum en	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
2 1 6 0 1 2. 01 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokum en	3.000.000
2 1 6 0 1 2. 01 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-	1	3.000.000	0	-	1 Dokum en	3.000.000
2 1 6 0 1 2. 01 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	6.800.000	2	5.000.000	0	6.000.000	2	5.000.00 0	2 Lapora n	22.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
2	1 6 1 0 2 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-	1	-	1	-	1	10.000.0 00	4 Lapora n	10.000.000
2	1 6 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	709.663.9 61	0	709.663.9 61	0	709.663.9 61	0	709.663 .960	1 OPD	2.838.655.84 3
2	1 6 1 0 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23	709.663.96 1	0	709.663.96 1	0	709.663.96 1	0	709.663. 960	23 Orang/ Bulan	2.838.655.843
2	1 6 1 0 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	10.000.00 0	3	10.000.00 0	3	10.000.00 0	2	10.000. 000	10 Orang	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
2 1 6 0 1 2. 05 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	10 Orang	40.000.000
2 1 6 0 1 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1	63.500.000	0	20.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	1 Kantor	117.500.000
2 1 6 0 1 2. 06 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.000.000	0	-	0	-	0	-	4 Paket	5.000.000
2 1 6 0 1 2. 06 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	22.000.000	0	-	0	-	0	-	25 Paket	22.000.000
2 1 6 0 1 2. 06 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	4.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	12 Paket	10.000.000
2 1 6 0 1 2. 06 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	12.500.000	0	-	0	-	0	-	4 Paket	12.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
2 1 0 2. 0 6 9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	20.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48 Lapora n	65.000.000
2 1 0 2. 0 6 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	0	-	1	3.000.000	0	-	1	-	2 Dokum en	3.000.000
2 1 0 2. 0 6 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	2	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	13.000.000	2 Unit	73.000.000
2 1 0 2. 0 6 07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6	20.000.000	0	20.000.000	5	20.000.000	0	13.000.000	11 Unit	73.000.000
2 1 0 2. 0 6 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	5	322.211.401	0	322.075.000	0	322.075.000	0	322.075.000	5 Jasa	1.288.436.401
2 1 0 2. 0 6 08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip	3	30.136.401	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12 Lapora n	120.136.401

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Sumber Daya Air dan Listrik	Dinamis pada SKPD										
2 1 6 0 1 2. 08 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	292.075.00 0	3	292.075.00 0	3	292.075.00 0	3	292.075. 000	12 Lapora n	1.168.300.000
2 1 6 0 1 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	2	35.000.00 0	3	35.000.00 0	3	40.000.00 0	3	30.000. 000	11 Unit	140.000.000
2 1 6 0 1 2. 09 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	15.000.000	0	20.000.000	0	25.000.000	0	15.000.0 00	2 Unit	75.000.000
2 1 6 2. 09 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0	-	0	-	0	-	3	15.000.0 00	3 Unit	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
2 1 6 0 1 2. 09 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	20.000.000	0	-	0	-	0	-	10 Unit	20.000.000
2 1 6 0 1 2. 09 1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	-	1	15.000.000	0	15.000.000	1	-	2 Unit	30.000.000
2 1 6 0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	25 %	472.500.0 00	25 %	462.500.0 00	25 %	462.500.0 00	25 %	457.500 .000	100%	1.855.000.00 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
2 1 0 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ko ta sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0%	472.500.0 00	25 %	462.500.0 00	25 %	462.500.0 00	25 %	457.500 .000	75%	1.855.000.00 0
2 1 0 2 01	1 5 Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminas ikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.00 0	8 Komuni tas	24.000.000
2 1 0 2 01	1 7 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2	15.000.0 00	5 Permohonan	75.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
							Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
2	1	0	2.	1	Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Rekome ndasi	5.000.000
2	1	0	2.	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	436.500.00 0	12	436.500.00 0	12	436.500.00 0	12	436.500. 000	60 Media	1.746.000.000
2	1	0	2.	2	Penyusunan konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Konten	5.000.000
2	1	0			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarak an secara online dan terintegrasi	0	3.320.000. 000	0	50.000.00 0	0	50.000.00 0	60 %	50.000. 000	60%	3.470.000.00 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
		Domain Kebijakan Internal SPBE	0		0		0		3		3	
		Domain Tata Kelola SPBE	0		0		0		3		3	
		Domain Manajemen SPBE	0		0		0		3		3	
		Domain Layanan SPBE	0		0		0		3		3	
2	1 6 3 01	2. 01	25 %	15.000.00 0	25 %	-	25 %	-	25 %	-	100%	15.000.000
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta										
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo										
2	1 6 3 01	2. 04	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	1 dokume n	15.000.000
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggara n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
						Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4		5		6		7		8	
2	1 6	0 3	2. 02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	42	3.305.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	42 OPD	3.455.000.000
2	1 6	0 3	2. 02	1 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	1 Laporan	200.000.000
2	1 6	0 3	2. 02	1 9	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	25.000.000
2	1 6	0 3	2. 02	2 3	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	42	30.000.000	0	-	0	-	0	-	42 Unit	30.000.000
2	1 6	0 3	2. 02	2 4	Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	42	3.200.000.000	1	-	1	-	1	-	42 Perangkat Daerah	3.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)				
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif			
1	2	3	4		5		6		7		8				
		dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
2	202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	25 %	71.500.000	25 %	59.500.000	25 %	59.500.000	25 %	69.500.000	100%	260.000.000			
2	202	2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	40	71.500.000	0	59.500.000	0	59.500.000	0	69.500.000	40 Kompilasi Produk Administrasi	260.000.000	
2	202	2,01	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1	10.000.000	0	-	0	-	0	1 Orang	10.000.000	
2	202	2,01	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	25	22.500.000	25	22.500.000	25	22.500.000	25	22.500.000	100 Persentase	90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)		
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5		6		7		8		
		Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan											
2 2 0 2 0 1 9		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25 Persentase	100.000.000
2 2 0 2 0 1 0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	20.000.000	20 Dokumen	50.000.000
2 2 0 2 0 1 1		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5	4.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	20 Dokumen	10.000.000
2 2 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan informasi	0	54.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	II	32.000.000	II indeks	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
2 2 1 0 2 2. 01	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0%	44.000.00 0	0%	22.000.00 0	0%	22.000.00 0	6%	22.000. 000	6%	110.000.000
2 2 1 0 2 2. 01 0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko	1	4.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.00 0	3 Dokum en	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Kabupaten/Kot a	ta yang Ditetapkan										
2 2 1 2 0 2 2. 01 0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	1 Lapora n	50.000.000
2 2 1 2 0 2 2. 01 0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	42 Perang kat Daerah	50.000.000
2 2 1 2 0 2 2. 02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah	0%	10.000.000	0%	10.000.000	0%	10.000.000	15%	10.000.000	15%	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (total)	
			Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
		berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan										
2 2 1 2 0 2 0 2 1	Operasionalisa si Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10 Perang kat Daerah	40.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai upaya mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, selaras, sinergis, serta harmoni antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2025 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan program prioritas Bupati yakni Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance di Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Mei 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710707 199101 1 003



Pemerintah
Kabupaten pamekasan